TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DESA LANGDA KECAMATAN BUNTU BATU KABUPATEN ENREKANG

Arianti Astari[1], Nurwani[2], Muhammad Abdian Abdillah[3]

Email: ariantiastari12@gmail.com[1], whanynur@gmail.com[2], Muhammad_abdian@ymail.com[3]

[1,2,3]Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare
Jl. Jend. Ahmad Yani No.Km.6, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan Kode Pos 91131

Abstrak

Arianti Astari, 2025. *Transparansi Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Langda Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.* Penelitian ini dilakukan di bawah bimbingan Ibu Nurwani sebagai pembimbing I dan Bapak Muhammad Abdian Abdillah sebagai pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis transparansi laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Langda, dan (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi transparansi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang memungkinkan peneliti mengeksplorasi fenomena secara mendalam dalam konteks kehidupan nyata. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini terdiri dari empat tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi laporan keuangan BUMDes Desa Langda masih rendah dan cenderung bersifat internal serta administratif. Transparansi belum menyentuh dimensi partisipatif dan informatif kepada masyarakat desa. Beberapa faktor penghambat transparansi meliputi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, tidak adanya forum musyawarah terbuka, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi, serta belum adanya regulasi atau standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaporan keuangan. Untuk mewujudkan transparansi yang ideal, diperlukan langkah strategis berupa penguatan regulasi desa, peningkatan literasi keuangan pengurus, pelatihan teknis pengelolaan keuangan, serta digitalisasi sistem pencatatan dan publikasi laporan keuangan. Partisipasi aktif masyarakat juga menjadi elemen penting dalam mendorong tata kelola BUMDes yang transparan dan akuntabel.

Kata Kunci : Transparansi, Laporan Keuangan, BUMDes, Tata Kelola

Abstract

Arianti Astari, 2025*. Financial Report Transparency of Village-Owned Enterprise (BUMDes) in Langda Village, Buntu Batu Subdistrict, Enrekang Regency. This research was conducted under the guidance of Mrs. Nurwani as the first supervisor and Mr. Muhammad Abdian Abdillah as the second supervisor. This study aims to (1) analyze the level of financial report transparency of the Village-Owned Enterprise (BUMDes) in Langda Village, and (2) identify the factors influencing such transparency. The research employs a qualitative method with a case study approach, enabling an in-depth exploration of phenomena within a real-life context. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation.The data analysis technique consists of four stages: data reduction, data presentation, conclusion drawing, and verification. The results indicate that the financial reporting transparency of BUMDes in Langda Village remains low and tends to be internal and administrative in nature. Transparency has not yet reached a participatory and informative dimension for the village community. Several inhibiting factors include limited human resource capacity, the absence of open public forums, lack of digital technology utilization, and the unavailability of regulations or standard operating procedures (SOPs) for financial reporting.To achieve ideal transparency, strategic steps are needed, including strengthening village regulations, improving financial literacy among managers, providing technical training in financial management, and digitalizing financial recording and reporting systems. Active community participation is also a crucial element in fostering transparent and accountable BUMDes governance.*

Keywords** : **Transparency, Financial Report, BUMDes, Governance

PENDAHULUAN

BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya.(Rivaldo Josua Kalangie, Stefanus Sampe, 2023).

Pelaporan merupakan aspek penting dalam pengelolaan BUMDes, karena laporan keuangan sektor publik berperan dalam menciptakan akuntabilitas. Sangat diharapkan dalam penyampaian laporan keuangan sektor publik bisa secara transparansi agar dapat diakses oleh siapa saja. Karena salah satu prinsip pendirian dari BUMDes yaitu bersifat transparansi atau terbuka dalam pemberian Informasi mengenai pengelolaannya tersebut.(Rivaldo Josua Kalangie, Stefanus Sampe, 2023).

Desa Langda yang berada di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang, merupakan salah satu desa yang telah membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai bagian dari strategi untuk memperkuat ekonomi lokal. Kehadiran BUMDES diharapkan mampu menjadi wadah bagi masyarakat dalam mengembangkan potensi desa yang ada, baik di sektor pertanian, perdagangan, jasa, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan warga. BUMDes Desa Langda telah menjalankan beberapa unit usaha yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan desa.

Transparansi dalam pengelolaan keuangan BUMDES sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang dikelola digunakan secara efektif dan efesien, serta untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengurus BUMDES. Kurangnya transparansi dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti penyalahgunaan dana, konflik internal, dan menurunnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan BUMDES. Sebagaimana diungkapkan oleh (Rahmatullah, Yasri Tarawiru, 2024) literasi keuangan dan transparansi pengelolaan keuangan sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa sumber daya digunakan dengan baik.

Di BUMDes Desa Langda, Transparansi pengelolaan laporan keuangan BUMDes Desa Langda masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari belum tersusunnya laporan keuangan secara lengkap, sehingga informasi mengenai penggunaan dana dan aktivitas usaha tidak dapat diakses secara menyeluruh oleh masyarakat. Selain itu, laporan keuangan juga belum dipublikasikan melalui papan informasi desa, sehingga masyarakat mengalami keterbatasan dalam memperoleh informasi terkait kondisi keuangan BUMDes.

Dalam praktik pengelolaan, seluruh pencatatan transaksi keuangan masih dilakukan secara manual tanpa memanfaatkan teknologi informasi atau sistem digital. Ketiadaan sistem tersebut berdampak pada terbatasnya keterbukaan dan kemudahan bagi masyarakat dalam menelaah laporan keuangan. Kondisi ini semakin diperburuk dengan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, di mana masyarakat cenderung pasif dan jarang mengajukan pertanyaan terkait pengelolaan keuangan BUMDes.

Minimnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan BUMDes juga berkaitan erat dengan rendahnya pemahaman terhadap laporan keuangan dan tata kelola usaha, baik di kalangan pengurus maupun masyarakat umum. Kurangnya literasi keuangan menjadi salah satu penyebab utama mengapa pengelolaan BUMDes belum mencapai tingkat optimal. Sebagai ilustrasi, di Desa Rosoan, Kabupaten Enrekang, terbatasnya pemahaman pengelola terhadap aspek keuangan menyebabkan kesulitan dalam menyusun anggaran serta membuat keputusan yang berkaitan dengan keuangan secara tepat. Situasi ini mengindikasikan bahwa tantangan serupa berpotensi terjadi di Desa Langda apabila peningkatan kapasitas pengelola tidak segera dilakukan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dibutuhkan langkah-langkah nyata seperti penyediaan laporan keuangan yang transparan dan mudah diakses oleh masyarakat, keterlibatan aktif warga dalam pengambilan keputusan, serta penyelenggaraan pelatihan bagi pengurus agar memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang manajemen dan akuntansi. Dengan mendorong transparansi, meningkatkan partisipasi, serta memperkuat kapasitas sumber

daya manusia, diharapkan pengelolaan BUMDes dapat berjalan secara lebih efektif, akuntabel, dan berkesinambungan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang merupakan salah satu strategi penelitian yang digunakan untuk mengeksplorasi fenomena secara mendalam dalam konteks kehidupan nyata. Pada penelitian ini, dilakukan penelitian langsung untuk mengetahui tentang Transparansi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Langda Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di BUMDes Desa Langda Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang. Waktu yang akan digunakan dalam penelitian ini mulai dari observasi lapangan, penyusunan rancangan penelitian dan analisis data hasil penelitian sekitar kurang lebih 2 bulan. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Juni-Juli 2025.

Informan

Dalam penelitian kualitatif posisi sumber data yang berupa manusia (narasumber) sangat penting peranannya sebagai individu yang memiliki posisi yang sama. Informan yang digunakan sebanyak delapan orang yang terlibat langsung di BUMDes Langda. Oleh karena itu narasumber bukan sekedar memberikan tanggapan pada yang diminta peneliti, tetapi ia dapat lebih memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang ia miliki. Informan yang dipilih dalam penelitian ini diambil sesuai dengan tema dari penelitian ini sehingga dapat memberikan informasi yang akurat. Adapun informan yang dipilih adalah yang berperan dan terlibat dalam pelaksanaan kegiatan BUMDes Desa Langda Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang, yaitu kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, direktur BUMDes, sekretaris BUMDes, bendahara BUMDes, BPD, tokoh masyarakat.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut sugiyono (2018) observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Teknik ini digunakan ketika penelitian berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, fenomena alam, serta dalam situasi dimana jumlah responden yang diamati tidak terlalu banyak.

Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab. Peneliti dalam melakukan wawancara menggunakan teknik wawancara terstruktur, dimana dalam pelaksanaannya peneliti menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan diajukan, tujuannya untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dilakukan dengan informan untuk menggali data tentang transparansi pengelolaan keuangan BUMDes.

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Maka dalam penelitian ini sumber yang dijadikan sebagai metode dokumentasi adalah data dari bahan-bahan tertulis yaitu dokumen-dokumen atau catatan dari desa Langda dan juga buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis untuk menguraikan, mengelola, dan menginterpretasikan data agar menjadi informasi yang bermanfaat. Tahapannya meliputi reduksi data, yaitu merangkum dan memfokuskan pada informasi penting dari data mentah; penyajian data, yaitu menyusun data dalam bentuk yang mudah dipahami seperti uraian, bagan, atau hubungan antar kategori; serta penarikan kesimpulan yang dilakukan secara bertahap dan diverifikasi berdasarkan data yang valid. Proses ini membantu peneliti dalam memahami temuan secara mendalam dan menghasilkan kesimpulan yang kredibel.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini melibatkan delapan informan, yang terdiri dari 3 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Rincian jumlah responden dapat dilihat pada tabel di bawah:

No.	Jenis Kelamin	Total
1	Laki-laki	3
2	Perempuan	5
	Jumlah	8

Desa Langda adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Langda memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang baik untuk bisa di kembangkan baik itu hasil pertanian, perkebunan, maupun kehutanan. Selain Sumber Daya Alam (SDA) yang baik, Desa Langda juga memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal. Hal itu di lihat dari semakin meningkatnya angka anak yang melanjutkan pendidikan sampai ke perguruan tinggi.

No.	Bidang	Potensi yang dimiliki
1	Pertanian	➢ Padi
2	Perkebunan	➢ Kopi ➢ Cengkeh ➢ Merica ➢ Coklat
3	sungai	➢ Wisata alam

Dilihat dari sosial budaya, penduduk Desa Langda 100% beragama Islam. Sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, yang lainnya pedagang, buruh tani, PNS, karyawan swasta, tukang batu, tukang kayu, guru swasta, sopir, dan penjahit. Desa Langda memiliki potensi yang sangat baik untuk terus dikembangkan. Di bidang pendidikan sudah berkembang, pendidikan mulai dari PAUD/TK, SD atau MI, SMP, SMA, dan perguruan tinggi.

Tingkat Transparansi Laporan Keuangan Bumdes Di Desa Langda

Transparansi laporan keuangan BUMDes di Desa Langda menunjukkan adanya upaya pencatatan dan pelaporan yang teratur, meskipun belum sepenuhnya terbuka kepada publik. Selain itu, dari segi kondisi keuangan, laporan keuangan yang masih belum tersusun menyeluruh dan belum lengkap. Hanya Sebagian laporan keuangan yang telah dibuat, seperti catatan kas harian untuk pemasukan dari unit usaha dan pengeluaran operasional. Namun belum ada penyususnan laporan keuangan yang mencakup komponen penting seperti buku besar dan arus kas. Hal ini menyulitkan dalam menilai kondisi keuangan BUMDes secara komprehensif dan akurat. Laporan keuangan BUMDes Desa Langda sebagia belum tersusun dan terdokumentasi dengan baik secara internal, tetapi keterbukaan kepada masyarakat masih rendah. Transparansi lebih banyak bersifat administratif dan vertikal ke pemerintah desa, belum menyentuh aspek horizontal atau partisipatif kepada publik. Tidak adanya forum terbuka, minimnya akses informasi, serta belum diterapkannya sistem digital, menjadi tantangan utama dalam meningkatkan kualitas transparansi keuangan BUMDes di desa ini.

Faktor Yang Memengaruhi Transparansi Laporan Keuangan Bumdes Di Desa Langda

Penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan BUMDes di Desa Langda masih menghadapi berbagai hambatan yang bersifat sistemik dan kultural. Rendahnya

keterbukaan informasi disebabkan oleh lemahnya pemahaman pengurus serta minimnya tekanan dari warga. Transparansi idealnya merupakan interaksi dua arah antara pengelola dan masyarakat sebagai pemilik kepentingan. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik transparansi BUMDes di Desa Langda terkendala oleh lemahnya regulasi, terbatasnya kapasitas pengurus, kurangnya staf, minimnya partisipasi warga, serta keterbatasan infrastruktur teknologi. Diperlukan upaya kolaboratif untuk mengatasi hambatan tersebut, melalui penyusunan regulasi desa, pelatihan teknis berkelanjutan, penyediaan sarana digital, serta penguatan kesadaran masyarakat untuk aktif mengawasi dan menuntut keterbukaan informasi. Hal ini penting agar tata kelola BUMDes menjadi lebih akuntabel, efisien, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Pembahasan

Tingkat Transparansi Laporan Keuangan Bumdes Di Desa Langda

Dalam konteks Desa Langda, meskipun telah dilakukan pencatatan keuangan secara manual sebagai bentuk tanggung jawab administratif, keterbukaan informasi masih bersifat internal dan belum menjangkau masyarakat luas. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes belum sepenuhnya mengadopsi prinsip good governance, khususnya dalam aspek akuntabilitas dan transparansi publik yang inklusif.

Namun demikian, laporan keuangan BUMDes di Desa Langda masih belum sepenuhnya mengikuti standar akuntansi yang berlaku, seperti Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) ataupun pedoman akuntansi desa. Walaupun sudah terdapat laporan neraca, laba rugi, dan arus kas, penyusunannya masih sederhana dan belum mengacu secara konsisten pada standar akuntansi yang berlaku. Akibatnya, kualitas informasi keuangan yang dihasilkan masih memiliki keterbatasan dalam hal akurasi dan kelengkapan, sehingga menyulitkan ketika digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja secara menyeluruh.

Secara empiris, bentuk transparansi di BUMDes Desa Langda tampak melalui praktik pencatatan kas harian dan tahunan serta penyampaian laporan pada forum Musyawarah Desa setiap akhir tahun. Praktik ini menunjukkan adanya keterbukaan administratif di lingkup internal pengelola (buku kas dan pelaporan tahunan). Namun, keterbukaan tersebut belum bertransformasi menjadi transparansi publik yang proaktif, akses informasi masih bergantung pada permintaan warga dan penjelasan lisan dari pengurus, sehingga keterbukaan cenderung bersifat reaktif dan tidak menjangkau masyarakat luas secara periodik. Jika dirujuk pada indikator transparansi menurut Mardiasmo (informatif, keterbukaan, dan pengungkapan), Praktik yang ada baru memenuhi aspek administratif dasar, sementara bentuk-bentuk transparansi yang ideal seperti publikasi ringkasan laporan berkala (bulanan/triwulanan), pemasangan papan informasi desa, penyediaan akses dokumen dan bukti transaksi yang relevan, serta kanal digital sederhana (misalnya grup resmi atau laman desa) belum berjalan konsisten. Akibatnya, informasi mengenai posisi kas, arus kas, dan kinerja unit usaha belum dapat dipantau warga secara mudah dan berkesinambungan, sehingga fungsi kontrol sosial dan akuntabilitas publik belum optimal.

Aspek pengawasan eksternal sesekali dilakukan melalui audit Inspektorat Kabupaten. Audit ini berfokus pada kesesuaian dokumen belanja dan pemasukan. Walau tidak dilakukan secara berkala, kehadiran audit memberi dorongan terhadap akuntabilitas BUMDes dan menegaskan pentingnya pencatatan keuangan yang konsisten.

Ketiadaan publikasi terbuka terhadap laporan keuangan mencerminkan lemahnya komitmen terhadap transparansi horizontal. yaitu keterbukaan kepada masyarakat desa sebagai pemilik sah dari BUMDes. Ketergantungan pada penyampaian informasi berdasarkan permintaan individu menunjukkan bahwa pengelolaan informasi masih bersifat reaktif, bukan proaktif. Praktik seperti ini tidak sejalan dengan semangat pemberdayaan masyarakat desa yang idealnya dilibatkan dalam pengawasan dan evaluasi atas jalannya pengelolaan keuangan desa.

Kondisi Desa Langda ini sejalan dengan temuan penelitian Kalangie dkk. (2023) di Langowan Barat, di mana laporan keuangan BUMDes juga hanya disampaikan ke otoritas desa tanpa publikasi luas. Demikian pula, penelitian Rahmatullah dkk. (2024) tentang rendahnya literasi keuangan pengurus BUMDes relevan, karena keterbatasan SDM menjadi faktor utama lemahnya transparansi di Desa Langda. Hal ini memperlihatkan bahwa masalah serupa banyak dialami oleh BUMDes di berbagai wilayah.

Faktor Yang Memengaruhi Transparansi Laporan Keuangan Bumdes Di Desa Langda

Salah satu faktor utama yang menjadi penghalang transparansi adalah rendahnya pemahaman pengelola mengenai arti penting keterbukaan. Laporan keuangan masih dipandang sebagai dokumen internal, bukan instrumen publik untuk memastikan akuntabilitas. Hal ini menyebabkan penyampaian laporan hanya dilakukan sebatas memenuhi kewajiban administratif, bukan untuk memberikan akses informasi secara luas kepada masyarakat.

Transparansi laporan keuangan BUMDes tidak dapat dilepaskan dari faktor struktural dan kultural yang membentuk pola pengelolaan di tingkat desa. Di Desa Langda, transparansi belum terbangun secara sistemik karena belum ada budaya organisasi yang menempatkan keterbukaan sebagai nilai utama dalam pengelolaan keuangan. Hal ini tercermin dari kecenderungan pengurus untuk menjadikan laporan keuangan sebagai kewajiban administratif semata, bukan sebagai alat pertanggungjawaban publik. Budaya birokrasi yang masih tertutup turut memperlemah semangat akuntabilitas kepada masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama.

Rendahnya literasi keuangan di kalangan pengurus juga memperlemah kualitas transparansi. Keterbatasan pemahaman terkait pencatatan dan penyusunan laporan sesuai standar akuntansi membuat dokumen keuangan cenderung sederhana dan tidak lengkap. Akibatnya, masyarakat maupun pemangku kepentingan lain sulit memahami kondisi keuangan BUMDes secara menyeluruh.

Faktor lain yang cukup berpengaruh adalah tingkat partisipasi masyarakat. Minimnya keterlibatan warga dalam mengawasi pengelolaan BUMDes membuat praktik keterbukaan tidak berkembang dengan baik. Ketika masyarakat tidak menunjukkan kepedulian, pengurus pun tidak merasa berkewajiban untuk menyampaikan laporan secara sistematis dan terbuka.

Faktor berikutnya adalah belum adanya standar operasional prosedur (SOP) dalam penyusunan laporan keuangan. Tanpa pedoman yang baku, pencatatan dan pelaporan dilakukan secara konvensional dan tidak konsisten. SOP seharusnya menjadi dasar untuk memastikan laporan disusun secara seragam, teratur, dan mudah dipahami.

Keterbatasan teknologi juga berperan besar dalam melemahkan praktik transparansi. Seluruh pencatatan keuangan masih dilakukan secara manual di buku kas. Tanpa perangkat digital, proses administrasi berjalan lebih lambat, rawan kesalahan, serta menyulitkan dokumentasi jangka panjang. Kondisi ini sekaligus mengurangi peluang publikasi laporan melalui media online.

Faktor teknologi informasi juga memainkan peran sentral dalam mendukung praktik transparansi keuangan di era digital. Sayangnya, BUMDes Desa Langda masih tertinggal dalam pemanfaatan teknologi untuk mendokumentasikan dan menyebarkan laporan keuangan.

Hasil penelitian oleh Rahmatullah dan tim (2024) di Kabupaten Enrekang juga menunjukkan bahwa rendahnya literasi keuangan pengelola serta minimnya pelatihan menjadi penyebab rendahnya transparansi dan akuntabilitas BUMDes. Penelitian ini merekomendasikan adanya pelatihan teknis, sistem pencatatan tertib, serta pelibatan masyarakat secara aktif. Rekomendasi tersebut sejalan dengan kebutuhan yang tampak jelas dalam konteks Desa Langda, di mana upaya kolaboratif dan sistematis sangat dibutuhkan untuk mendorong praktik tata kelola yang lebih akuntabel dan responsif terhadap kepentingan publik.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Transparansi laporan keuangan BUMDes di Desa Langda masih bersifat internal, administratif, dan vertikal, belum menyentuh dimensi partisipatif dan informatif kepada masyarakat. Keterbatasan kapasitas SDM, tidak adanya forum diskusi publik, belum diterapkannya media digital, dan pasifnya keterbukaan informasi menjadi faktor-faktor utama yang menghambat tercapainya transparansi yang ideal. Upaya pembenahan perlu difokuskan pada peningkatan literasi keuangan, pelaporan berkala, digitalisasi sistem informasi, serta penguatan regulasi publikasi keuangan yang inklusif.

Transparansi laporan keuangan BUMDes di Desa Langda masih rendah akibat lemahnya pemahaman pengurus, ketiadaan regulasi, dan minimnya partisipasi masyarakat. Keterbatasan SDM, infrastruktur, serta belum adanya SOP memperburuk kondisi pelaporan. Diperlukan regulasi desa, pelatihan teknis, dan digitalisasi pencatatan keuangan. Partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci penguatan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Saran

Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BUMDes, diperlukan pelatihan teknis berkelanjutan bagi pengurus terkait pembukuan dan pelaporan keuangan yang praktis dan sesuai dengan konteks desa. Pemerintah desa bersama BUMDes juga perlu menetapkan Peraturan Desa (Perdes) dan SOP yang mengatur kewajiban pelaporan keuangan secara terbuka dan berkala. Selain itu, digitalisasi sistem pelaporan melalui aplikasi sederhana, website, atau media sosial resmi perlu segera diterapkan guna meningkatkan aksesibilitas dan akurasi data. Partisipasi masyarakat juga penting melalui forum diskusi publik atau musyawarah desa rutin untuk mendorong pengawasan, evaluasi, serta pemberian masukan terhadap pengelolaan keuangan BUMDes.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Akbar, A. M., Sasanti, E. E., & Suryantara, A. B. (2022). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Bumdes Bina Sejahtera Kembang Kerang, Kabupaten Lombok Timur. Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi, 2(4), 716–725. https://doi.org/10.29303/risma.v2i4.310

[2] AMRI, M. (2018). Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pt. Incipna Indonesia. e-jurnal, 7-10.

[3] Angelina Trimurti Rambu Ana, L. L. (2021). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Keuangan Bumdes (Studi Kasus Bumdes Ina Huk). Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas, 62-72.

[4] Arnis, M. (2018). Penerapan Prinsip-Prinsip Pengolahan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Memperkuat Ekonomi Pedesaan Di Desa Panton Makmur Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya. 1–80.

[5] Fajaruddin, F. (2021, August). Konsep transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. In Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora (Vol. 1, No. 1, pp. 662-671).

[6] FITRIANA, N. (2021). TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA DI ROWOREJO, KECAMATAN NEGERI KATON (PESAWARAN) DALAM PERSPEKTIF GOOD CORPORATE GOVERNANCE. Pharmacognosy Magazine, 75(17), 399–405.

[7] Goo, E. E. K., & Sanda, E. M. (2022). Analisis Pelaksanaan Tata Kelola Rencana Strategis, Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi di Desa Magepanda Kecamatan Magepanda). Accounting Unipa, 1(1), 20–34.

[8] Halim, Abdul. 2017, Sistem Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: UPP STIM YKPN

[9] Hanafi, M Mamduh & Halim, Abdul. 2016. Analisis Laporan Keuangan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN

[10] Kristianten.2006. Transparansi Anggaran Pemerintah. Jakarta: Rineka Cipta

[11] Mudhofar, M. (2022). Analisis Implementasi Good Governance Pada Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, 10(1), 21–30. https://doi.org/10.17509/jrak.v10i1.36763
[12] Na'ila Sifaur Rohmah, N. S. (2023). Analisis Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan BUMDes Terhadap Laporan Aset Desa (Studi Kasus BUMDes Cinandang Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto). e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi, 681-690.
[13] Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo. Journal of Economic, Management, Accounting and Technology, 3(2), 92–107. https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1283
[14] Pahlevi, M. I., Susilowati, E., & Widoretno, A. A. (2022). Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa. 5(3), 1480–1486.
[15] Pirmatua Sirait. 2014. Analisis Laporan Keuangan. Yogyakarta : Ekulibiria
[16] Rahmatullah, Yasri Tarawiru, H. H. (2024). ROSOAN KABUPATEN ENREKANG The Financial Literacy Level of Bumdes Managers in Business Development at. 4(November), 514–527.
[17] Rivaldo Josua Kalangie, Stefanus Sampe, N. K. (2023). Transparansi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa. Jurnal Governance, 3(2), 12–26. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/5250
[18] Suryanto, Rudi. 2018. Peta Jalan BUMDes Sukses, Yogyakarta : PT. Syncore Indonesia